



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

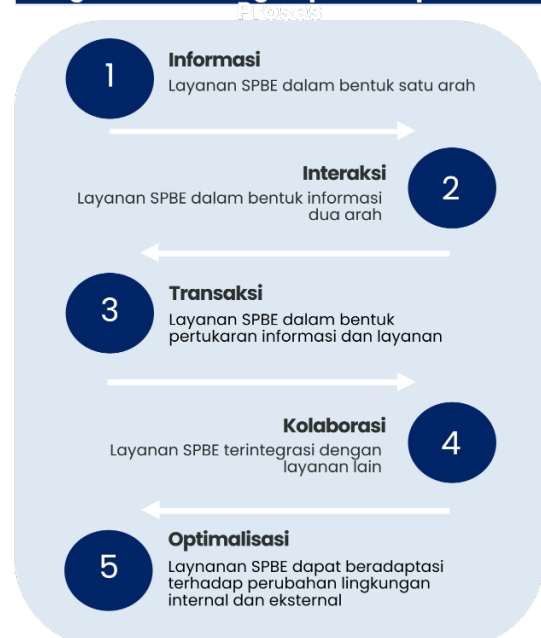
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



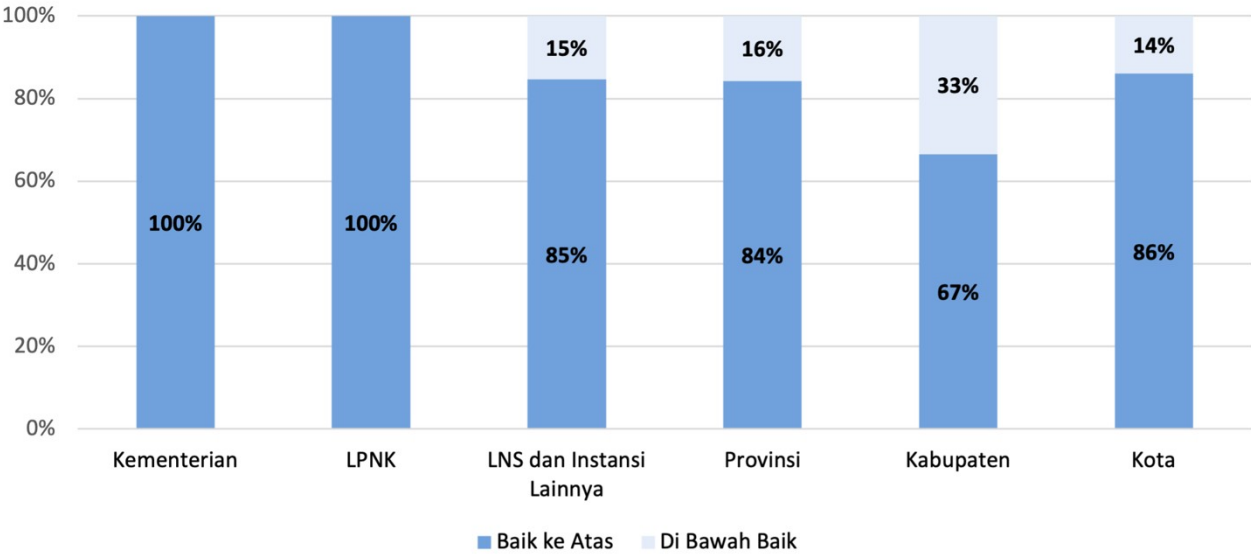
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

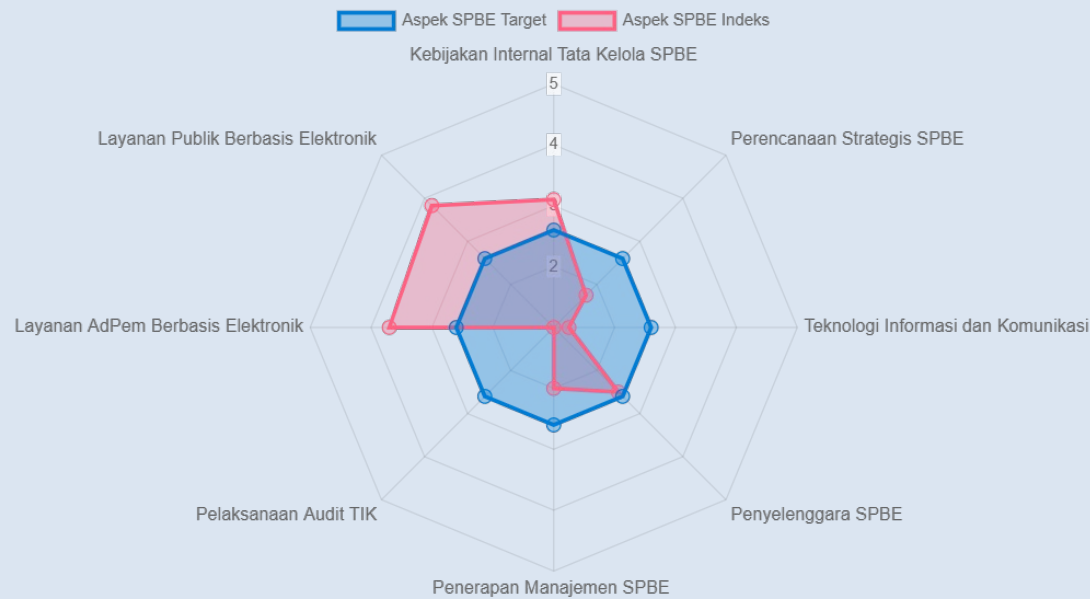
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,82
Domain Kebijakan SPBE	3,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,10
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,25
Penyelenggara SPBE	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,73
Penerapan Manajemen SPBE	2,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,75
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya SK Sekda No 180/89/HUK/2024 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan di dalam kebijakan tersebut juga telah mengatur norma pengaturan penerapan Tim koordinasi SPBE.
- Kelemahan
-

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah dengan adanya Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan
Belum Memiliki Kekuatan Pada Aspek Ini
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Barito Timur masih belum memiliki Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur terkait Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, dimana tidak ditemukan adanya Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan. Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dibuktikan dengan dokumentasi proses penyusunan, namun belum terdapat Arsitektur SPBE as-is yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE belum dapat ditunjukkan. Begitu juga dengan Inovasi Proses Bisnis SPBE belum ditunjukkan dokumen model Peta Proses Bisnis as-is dan to-be.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE.

- Kekuatan
Belum Memiliki Kekuatan Pada Aspek Ini
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Barito Timur masih belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah , dimana tidak ditemukan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan. Sudah terdapat Layanan Pusat Data yang ditunjukkan dengan dokumentasi operasional berupa SOP, namun data dukung tersebut belum memperlihatkan utilisasi layanan pusat data. Data dukung berupa laporan penggunaan pusat data di sebagian atau seluruh unit kerja / perangkat daerah belum diperlihatkan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
-
- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Barito Timur sudah melakukan kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Namun, belum terlaksana secara rutin dan dengan perencanaan yang jelas dan evaluasi berkelanjutan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
Belum Memiliki Kekuatan Pada Aspek Ini
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Barito Timur masih belum memiliki Penerapan Manajemen SPBE yang mengatur Manajemen Perubahan, dimana tidak ditemukan adanya Penerapan Manajemen SPBE yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan. Selain itu, belum dapat ditunjukkan bukti dukung berupa Peta Rencana SPBE yang mengatur Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Data serta pelaksanaan manajemen layanan pada tahap pelayanan pengguna dan pengelolaan aplikasi.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum ada dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

- Kekuatan
Belum Memiliki Kekuatan Pada Aspek Ini
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur masih belum memiliki Pelaksanaan Audit TIK yang mengatur Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE hingga Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Audit TIK yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan hingga Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Beberapa Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti KRISNA, SIPD, SPSE E-Katalog, SIASN, MyASN, SRIKANDI, dan E-Kinerja BKN telah diterapkan oleh IPPD.
- Kelemahan
-

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik hingga Layanan Publik Sektor 3 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Beberapa Layanan Publik Berbasis Elektronik seperti SPAN LAPOR, JDIH, OSS, dan Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan telah diterapkan oleh IPPD.
- Kelemahan
-

REKOMENDASI

Evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa penerapan SPBE di Kota ini telah berada pada tingkat kematangan yang Baik dengan beberapa keunggulan dan beberapa kelemahan. Hal yang patut diapresiasi untuk penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah lonjakan Indeks penerapan SPBE yang signifikan dari tahun sebelumnya, dari tingkat kematangan yang secara rata-rata Cukup menjadi Baik. Hal ini menunjukkan progresi yang menjanjikan untuk semakin meningkatnya kematangan penerapan SPBE di Kabupaten Barito Timur.

Keunggulan:

Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah berhasil memperoleh tingkat kematangan yang Sangat Baik pada Aspek 7, yakni Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek 8, yakni Layanan Publik Berbasis Elektronik. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sangat baik ditunjukkan dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan hingga Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Beberapa Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti KRISNA, SIPD, SPSE E-Katalog, SIASN, MyASN, SRIKANDI, dan E-Kinerja BKN telah diimplementasikan dengan sangat baik. Tingkat kematangan yang sangat baik juga terlihat pada pemanfaatan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik hingga Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Beberapa Layanan Publik Berbasis Elektronik seperti SPAN LAPOR, JDIH, OSS, dan Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan telah diterapkan dengan sangat baik.

Pada Aspek 1, yakni Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, tingkat kematangan Baik dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini terlihat adanya Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya SK Sekda No 180/89/HUK/2024 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Di dalam kebijakan tersebut juga telah diatur norma pengaturan penerapan Tim koordinasi SPBE

Kelemahan:

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi pada aspek lainnya. Pada Aspek 2, yakni Perencanaan Strategis SPBE, Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum memiliki Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur terkait Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, dimana tidak ditemukan adanya Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur secara komprehensif pada bukti dukung yang disampaikan. Arsitektur SPBE telah dibuktikan dengan adanya dokumentasi proses penyusunan, namun belum terdapat Arsitektur SPBE as-is yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Begitu juga pada Inovasi Proses Bisnis SPBE belum dapat ditunjukkan dokumen model Peta Proses Bisnis as-is dan to-be.

Pada Aspek 3, yakni Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dari bukti dukung yang disampaikan. Sudah terdapat Layanan Pusat Data yang ditunjukkan dengan dokumentasi operasional berupa SOP, namun data dukung tersebut belum memperlihatkan utilisasi layanan pusat data. Selanjutnya, laporan penggunaan pusat data di sebagian atau seluruh unit kerja juga belum dapat diperlihatkan.

Pada Aspek 4, yakni Penyelenggara SPBE, Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum melaksanakan secara rutin kegiatan kolaborasi penerapan SPBE dan juga melakukan evaluasinya yang berkelanjutan.

Pada Aspek 5, yakni Penerapan Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum memiliki Penerapan Manajemen SPBE yang mengatur Manajemen Perubahan, dimana tidak ditemukan adanya Penerapan Manajemen SPBE yang mengatur secara komprehensif dari bukti dukung yang disampaikan. Selain itu, belum dapat ditunjukkan Peta Rencana SPBE yang mengatur Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Data serta pelaksanaan manajemen layanan pada tahap pelayanan pengguna dan pengelolaan aplikasi.

Pada Aspek 6, yakni Pelaksanaan Audit TIK, Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum memiliki Pelaksanaan Audit TIK yang mengatur Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE hingga Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Rekomendasi:

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi SPBE, Pemerintah Kabupaten Barito Timur disarankan untuk segera menyiapkan Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur terkait Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE. Perlu juga disediakan Arsitektur SPBE as-is yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Inovasi Proses Bisnis SPBE juga perlu segera ditunjukkan dengan adanya dokumen model Peta Proses Bisnis as-is dan to-be. Perlu dipersiapkan pula Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Perlu pula digencarkan utilisasi layanan pusat data dan dokumentasinya. Hendaknya ditingkatkan kegiatan kolaborasi penerapan SPBE dan juga pelaksanaan evaluasinya yang berkelanjutan. Penerapan Manajemen SPBE yang mengatur Manajemen Perubahan juga perlu disegerakan dengan membuat Peta Rencana SPBE yang mengatur Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Data. Akhirnya, perlu dipersiapkan dan dilaksanakan Pelaksanaan Audit TIK yang mengatur Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE hingga Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024